

PERAN SERTA PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN USAHA DAGANG KECIL DAN MENENGAH (UDKM) DI JAWA TENGAH

Endang Swastuti

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.

Telp (024) 8316187; Fax (024) 8316193

Abstrak

Berdasarkan hasil analisis Partisipasi Perempuan dalam Manajemen Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (UDKM) di Jawa Tengah, didapatkan bahwa kepemilikan perempuan atas UDKM lebih dari laki-laki, bagaimanapun, akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diterima oleh perempuan sebagai akibat dari upaya manajemen masih lebih rendah dari laki-laki, karena perempuan masih dibebani dengan tugas-tugas yang domestik. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan akses, kontrol, dan manfaat dari partisipasi perempuan dalam manajemen UDKM sehingga keadilan gender dan kesetaraan dapat dicapai.

Kata kunci: Access, Manfaat, Pengendalian dan Partisipasi

Abstract

Base on the analysis Participation of Women in Management of Small and Medium Enterprises Trade (UDKM) in Central Java, the result that women's ownership over UDKM more than men, however, access, control, participation and benefits received by women as a result of management efforts still lower than men, because women are still burdened with tasks that are domestic. For that we need efforts to increase access, control, and benefits of women's participation in the management UDKM, so that gender justice and equality can be achieved.

Keywords: Access, Benefits, Control and Participation

Pendahuluan

Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bentuk usaha yang tangguh, dan memiliki posisi strategis dalam pembangunan. Hal ini telah terbukti, selama masa krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia sekitar tahun 1998, Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bentuk usaha yang tangguh dan mampu survive. Hal ini disebabkan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) mampu beradaptasi dalam hal biaya, produksi, dan pemasaran dengan cepat. Selain itu kemudahan memasuki pasar, membuat Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu usaha yang menarik dalam mencari solusi di masa krisis ekonomi yang telah banyak membuat usaha-usaha besar melakukan pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang terkena PHK banyak yang memasuki Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai sektor informal. Disamping itu peranan strategis Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah

(IKM) dapat ditunjukkan (1) Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) lebih banyak daripada usaha besar, serta bersifat padat karya sehingga mampu menyerap jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada usaha besar yang cenderung bersifat padat modal dan padat teknologi; (2) Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) lebih banyak menggunakan bahan baku lokal dan memiliki dampak berganda bagi perkembangan unit-unit usaha pendukung lainnya, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta perdagangan kecil dan menengah; dan (3) perkembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki *multiplier effect* pengembangan industri kreatif di daerah, terutama usaha pengelolaan bahan makanan, rumah makan (kuliner), garment, fashion, karya seni, perhiasan dan lain-lain yang banyak menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, keberadaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat memberikan suatu kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan efek negatif urbanisasi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Menurut data Bappeda Jawa Tengah (2010), UMKM yang ada di Jawa Tengah sebanyak 1,5 juta unit usaha dan mampu menyerap lebih kurang 5 juta orang, yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu secara nasional Jawa Tengah disebut sebagai “Jantungnya Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia”, dengan produk unggulan antara lain : pakaian jadi, tenun, batik, produk kerajinan dari kulit, mebelair dan berbagai produk-produk makanan olahan yang bersifat khas daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM yang telah dibina pada tahun 2010 sebanyak 67.616 unit dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 70.222 unit, atau meningkat sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pengelompokan usaha, UMKM yang telah dibina terdiri dari : (1) UMKM non pertanian sebanyak 23.374 unit; (2) UMKM pertanian sebanyak 10.097 unit; UMKM perdagangan sebanyak 28.362 unit dan (4) UMKM jasa sebanyak 8.389 unit (RKPD Provinsi Jawa Tengah 2013).

Terkait dengan besarnya omset dan jumlah tenaga kerja yang terserap menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Besarnya omset UMKM yang telah dibina tersebut pada tahun 2011 sebesar Rp. 14,74 triliun atau meningkat sebesar 40,94% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 10,46 triliun. Sedangkan banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam UMKM pada tahun 2010 diketahui sebanyak 285.335 orang dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 293.877 orang atau meningkat sebesar 2,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang menggembirakan yaitu tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja lokal, dan sebagian besar merupakan tenaga kerja perempuan baik yang terampil maupun tenaga kerja kurang terampil di pedesaan (Mudrajad, 2007).

Fasilitasi dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, khususnya kelompok usaha dagang skala kecil dan menengah (UDKM) pada tahun 2011 sebanyak 229.894 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sebesar 662.674 orang, atau rata-rata setiap unit UDKM mempekerjakan sebanyak 2 – 4 orang pekerja dengan rata-rata modal usaha sebesar Rp 5 juta – Rp 10 juta setiap unit usaha. Unit-unit usaha UDKM sebagian besar mempekerjakan tenaga kerja perempuan kelompok usia produktif (15 – 55 tahun) dan jangkauan kegiatan usaha di tingkat lokal, baik dipertanian dan pedesaan. Fasilitasi dan pengembangan usaha yang diberikan pada UDKM akan dapat meningkatkan keterampilan usaha, akses permodalan, jaminan keberlangsungan usaha dan meningkatkan sumbangan ekonomi rumah tangga.

Pengelolaan UDKM pada umumnya dikelola secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga, meskipun pada awalnya usaha tersebut dirintis oleh perempuan (istri), namun pada akhirnya keterlibatan laki-laki (suami) dalam kadar tertentu tidak dapat dihindarkan.

Pengelolaan secara bersama-sama ini menyebabkan membaurnya manajemen usaha dan manajemen rumah tangga, sehingga seringkali terjadi kekacauan manajemen usaha, karena tidak ada pemilahan secara tegas antara manajemen usaha dan manajemen keluarga. Pendapatan usaha yang semestinya digunakan untuk meningkatkan usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat mendesak dan bersifat tidak terduga.

Selain persoalan manajemen usaha, sektor industri kecil, dan menengah juga lekat dengan isu gender, terutama yang bertalian dengan aktifitas produktif dan reproduktif yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Perempuan pelaku usaha biasanya mempunyai jam kerja yang lebih panjang dibanding laki-laki, sebab, selain harus mengelola usaha mereka juga masih dibebani kegiatan-kegiatan domestik. Ketidakseimbangan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak saja meminggirkan perempuan tetapi juga berdampak terhadap efisiensi usaha. Padahal perempuan potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut perempuan potensial berperan aktif dalam proses *recovery* ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan ini. Dalam kondisi demikian kajian dengan tema “peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah” relevan untuk dibicarakan, khususnya dalam upaya menyalurkan pemulihan ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan perempuan. Perempuan sangat potensial dan memiliki kompetensi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, sehingga perempuan sebagai pelaku bisnis, pengelola, pembina/ pendamping, ataupun sebagai tenaga kerja, tentu saja masih terus perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilannya. Oleh karena itu perlu dikaji peranserta perempuan dalam pengelolaan UDKM.

Perumusan Masalah

Perempuan memiliki berbagai kelebihan seperti keuletan, etos kerja yang tinggi, juga memiliki kelemahan-kelemahan yang menghambat peranan dan partisipasinya dalam perekonomian Indonesia. Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan UDKM masih sangat terbatas, karena masih tingginya domestifikasi peranan perempuan. Untuk itu perlu dilakukan studi secara mendalam guna memperoleh gambaran kemampuan dan peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah di Jawa Tengah.

Tujuan dan Kegunaan.

Tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah di Jawa Tengah.

Metodologi

Untuk menganalisis peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah, digunakan analisis gender dan Gender Analysis Pathway (GAP). Menurut Permendagri 15 tahun 2008, analisis gender merupakan analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, serta partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis gender adalah suatu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan

perempuan, untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Untuk melakukan analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender. Guna memudahkan pemahaman dan bagaimana mengaplikasikan analisis gender, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu :

- Menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya.
- Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan obyektif.
- Mengidentifikasi kesenjangan gender dari aspek peran, akses, kontrol, dan manfaat, guna menentukan isu gender secara menyeluruh.

Sedangkan analisis Gender Analysis Pathway (GAP) digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan, berupa kebijakan, program serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki. Gender Analysis Pathway merupakan metode yang telah banyak dikembangkan di Indonesia, terutama dalam proses perencanaan program-program yang responsif gender. Tujuan penggunaan metode GAP adalah untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan yang menjadi pokok bahasan, mulai dari aspek kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Data pilah gender adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin: laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Data gender dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang menjelaskan bahwa data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan data pilah adalah data yang ada sudah dipilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya, bidang kekerasan terhadap perempuan serta kelembagaan pengarusutamaan gender.

Data gender mencakup data terpilah gender dan data spesifik gender. Data terpilah gender yaitu data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data spesifik gender yaitu data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin dan telah mengarah pada isu gender. Data gender dapat berupa data kuantitatif yang diperoleh dari BPS, data sektor, atau data sekunder yang relevan lainnya. Data gender dapat juga berupa data kualitatif yang diperoleh dari observasi, FGD, dan wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif.

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam kegiatan ekonomi sebagai wirasaha telah ada sejak dahulu, karena sejak dahulu telah banyak perempuan yang terjun dalam dunia perdagangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Swastuti dan Nurchayati (2007) menyebutkan bahwa, dari 100 responden yang diteliti 37% (37 perempuan) bekerja sebagai pedagang kecil dan menengah dan 33% bekerja sebagai pegawai swasta dan hanya 11% yang bekerja sebagai petani. Kondisi ini menunjukkan

• bahwa, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal. Namun demikian peranserta perempuan dalam pengelolaan UDKM masih banyak mengalami berbagai hambatan, misalnya perempuan sampai saat ini masih saja terjadi ketimpangan - ketimpangan terhadap perempuan, sehingga menyebabkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Studi yang dilakukan oleh Rahayu (2007) menyebutkan bahwa usaha mikro terutama digerakan oleh perempuan, namun perempuan tidak sepenuhnya memiliki kendali atas usaha yang dijalankannya. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Swastuti dan Nurchayati (2007) menyebutkan bahwa, aktivitas ekonomi keluarga banyak didukung oleh perempuan, karena keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah sangat besar, yaitu 91% responden perempuan menyatakan ikut bekerja, namun demikian dalam memutuskan pengelolaan keuangan rumah tangga masih didominasi oleh suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa, tanggungjawab perempuan terhadap pekerjaan (domestik) masih sangat besar, namun akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang dimiliki hanya sedikit.

Untuk menganalisis peranserta perempuan dalam pengelolaan UDKM dilihat dari empat faktor utama untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender, yaitu: Akses, yaitu peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Analisis terhadap faktor akses akan diketahui apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.

- Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang/ kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Analisis terhadap faktor partisipasi akan menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi ?
- Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Analisis terhadap faktor kontrol akan diketahui apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut.
- Manfaat merupakan kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal. Analisis terhadap faktor manfaat akan diketahui apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan?

Dengan melakukan analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat perempuan dalam mengelola sumberdaya, khususnya usaha dagang kecil dan menengah, maka akan dapat diketahui peranserta perempuan dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah.

Analisis

Analisis Gender Pada UDKM dan IKM di Jawa Tengah

Sentra industri pengolahan pangan Provinsi Jawa Tengah tersebar di beberapa penjurukabupaten kota, jumlah unit usaha yang ada sebanyak 103.201 unit usaha, sedangkan jumlah tenaga kerjanya mencapai 248.434 orang yang bekerja di beberapa sentra. Nilai investasi industri pengolahan pangan Provinsi Jawa Tengah per tahunnya mencapai Rp. 246.703.636 dan nilai produksi per tahun senilai Rp 3.391.544.772. Sentra industri pangan banyak terdapat di kabupaten Batang, terbukti di kabupaten Batang ada sekitar 36 sentra industri pangan.

Industri sandang yang ada hampir terdapat di semua kabupaten di Jawa Tengah. Terutama di Kabupaten Kudus karena disana terdapat 17 jenis sentra industri sandang. Jumlah unit usaha yang ada sebanyak 46.205 unit usaha dan mempunyai jumlah tenaga kerja 159.722 orang. Nilai investasi per tahun

industri sandang ini mencapai Rp 596.028.784 sedangkan nilai produksinya mencapai Rp 22.547.747.518.

Sentra industri kimia dan bahan bangunan banyak terdapat di kabupaten Magelang, yaitu sebanyak 19 jenis sentra. Jumlah unit usaha yang ada sebanyak 25.119 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 82.548 orang. Nilai investasi pertahun senilai Rp 176.977.847 dan nilai produksi per tahun mencapai Rp 8.035.454.236.

Sentra industri kerajinan paling banyak di temui di kota Magelang. Disana terdapat hamper 46 jenis industri kerajinan yang tersebar di beberapa pusat kota magelang. Adapun jumlah unit usaha yang ada di kota Magelang sebanyak 67.979 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 184.928 orang. Dari banyaknya jenis industri kerajinan Jawa Tengah di tahun 2011 nilai investasi per tahun mencapai Rp 286.025.275 dengan nilai produksi per tahunnya mencapai Rp 9.468.763

Sentra industri logam dan elektro di Jawa Tengah didominasi oleh kota Tegal dengan jumlah jenis industri sebanyak 14 jenis. Namun demikian, jika dibandingkan dengan sentra-sentra industri yang lain, sentra industri logam dan elektro memiliki jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja yang paling kecil yaitu sejumlah 23.712 unit usaha dan 14.852 orang tenaga kerja. Nilai investasi dan nilai produksi per tahunnya juga lebih sedikit jika di banding dengan sentra-sentra industri yang lain yang tersebar di Jawa Tengah. Nilai investasi per tahunnya yaitu Rp 26.719.713 dan nilai produksinya hanya mencapai Rp 349.104.826 per tahun..

Usaha kecil dan industri kecil adalah salah satu penopang kegiatan perekonomian yang mempunyai peranan sangat besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Usaha dan industri kecil di Provinsi Jawa Tengah menurut data yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai tahun 2011 mencapai angka 223.105 unit. Keberadaan sentra-sentra usaha dan industri kecil berada tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dan mempunyai keragaman jenis produk yang dihasilkan. Secara garis besar jenis-jenis usaha kecil dan industri kecil yang ada tersebut dimasukan dalam 5 klaster besar yaitu; sandang, pengolahan makanan, kerajinan, kimia dan bahan bangunan, serta logam dan elektro.

Industri kecil yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar bergerak di sektor pengolahan makanan, sedangkan paling kecil adalah sektor logam dan elektro. Industri pengolahan makanan ini tersebar di semua wilayah Jawa Tengah dengan jumlah yang banyak karena usaha ini tidak begitu membutuhkan modal yang besar, ketrampilan khusus, ketersediaan bahan baku, pemasaran yang mudah dan bersifat lokal. Produk yang dihasilkan dari industri ini antara lain tahu, tempe, aneka keripik, pengolahan hasil perikanan, dan sebagainya.

Dari data dapat dilihat bahwa usaha-usaha yang pemiliknya perempuan paling tinggi adalah bidang sandang yaitu 19.132 pemilik perempuan dari total 25.701 unit usaha yang ada, sedangkan bidang lain memang masih banyak dikuasai oleh kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Kepemilikan Usaha

Berdasarkan hasil survey 140 responden, kepemilikan usaha sebagian besar dimiliki oleh perempuan 67,85%.

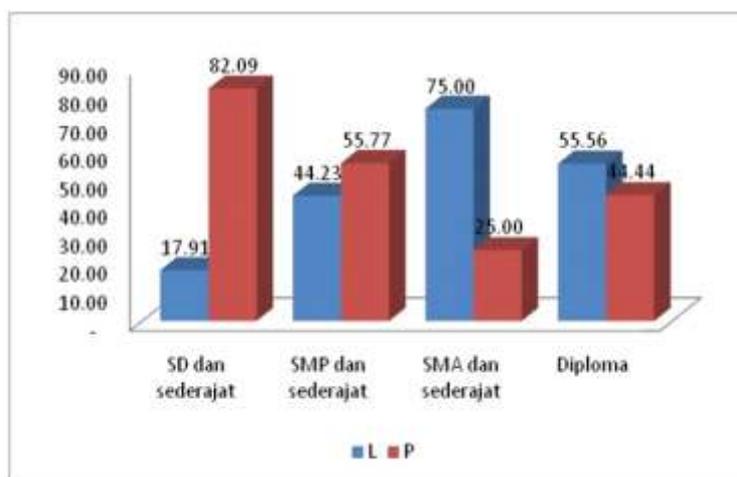
Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pendidikan pemilik usaha UDKM dan IKM rata-rata SD (Sekolah Dasar) sebanyak 48%, dan SMP sebanyak 48%.

Tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa perempuan memiliki pendidikan formal lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan yang memiliki pendidikan Sekolah

Dasar sebesar 82,09 %, pendidikan sekolah menengah pertama sebanyak 55,77%, SMA sebanyak 25% dan diploma sebesar 44,44%. Sedangkan laki-laki yang memiliki pendidikan SD sebanyak 17,91%, SMP sebanyak 44,33%, SMA sebanyak 75% dan diploma sebanyak 55,56%.

Gambar 1
Tingkat Pendidikan Responden IKM dan UDKM Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Hasil Penelitian

Dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut pemerintah telah berupaya dengan memberikan pendidikan non formal kepada IKM dan UDKM tersebut. Namun demikian dikarenakan keterbatasan anggaran, belum semua IKM dan UDKM mendapatkan pelatihan. Berdasarkan data penelitian responden yang telah mendapatkan pelatihan sebanyak 54% dan yang tidak mendapatkan pelatihan sebanyak 46%. Jenis pelatihan yang diterima hanya pelatihan teknik dan keuangan.

Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Berdasarkan hasil penelitian, akses istri (perempuan) dalam mendapatkan peningkatan sumberdaya dalam hal ini pelatihan sangat kecil hanya 21% sedangkan suami (laki-laki) sebesar 70%. Demikian juga dengan partisipasi mengikuti pelatihan lebih banyak laki-laki dalam hal ini suami dibandingkan perempuan (istri).

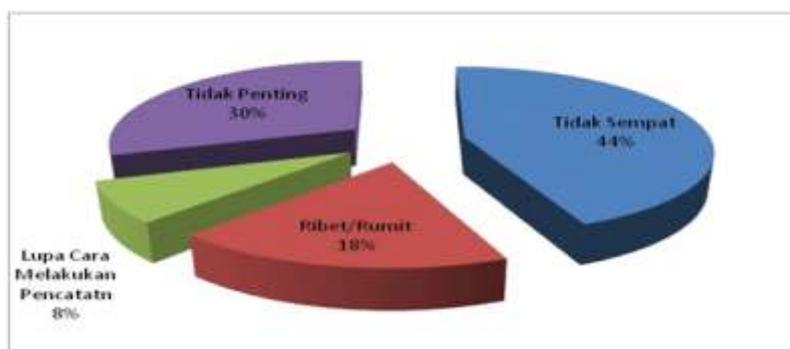
Peningkatan produksi dengan menggunakan teknologi masih belum optimal. Pengusaha IKM dan UDKM masih menggunakan cara-cara yang biasa. Berdasarkan hasil survei 40,71% belum memiliki ketrampilan dalam penguasaan teknologi

Melihat fenomena di atas jelas dapat diartikan bahwa untuk mencapai kapasitas SDM yang baik sangat kecil. Hal ini dikarenakan akses dan partisipasi dikuasai oleh laki-laki namun dalam pengelolaan produksi menjadi tanggung jawab perempuan (istri). Alasan yang dikemukakan adalah laki-laki dalam hal ini suami memiliki waktu yang banyak dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dalam hal ini istri tidak mengikuti pelatihan dikarenakan harus mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga serta fokus pada pelaksanaan produksi. Adanya domestifikasi terhadap perempuan ini menyebabkan beban kerja perempuan menjadi lebih berat, karena disamping harus mengurus usaha (produksi) juga harus mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, akibatnya perempuan tidak mempunyai waktu untuk

mengikuti kegiatan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Berdasarkan hasil penelitian bagi IKM yang memiliki omset 500 ribu sampai 100 juta tidak memiliki pencatatan keuangan. IKM yang memiliki pencatatan keuangan sebesar 27%, sedangkan sisanya tidak melakukan pencatatan.

Alasan IKM dan UDKM tidak melakukan pencatatan keuangan adalah kurangnya waktu untuk melakukan pencatatan sehingga mereka tidak melakukan pencatatan, mereka menganggap pencatatan adalah sesuatu yang rumit, mereka tidak lupa cara melakukan pencatatan dan pencatatan dianggap sesuatu yang tidak penting.

Gambar 2
Alasan IKM dan UDKM Tidak Melakukan Pencatatan Keuangan



Sumber: Hasil Penelitian

Bagi IKM dan UDKM yang melakukan pencatatan, pencatatan keuangan dilakukan oleh istri, anak dan karyawan. Melihat permasalahan di atas maka isu gender yang ditemukan adalah perempuan pemilik usaha memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemilik usaha rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan.

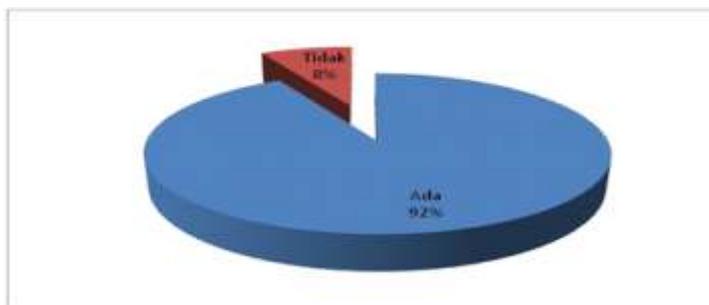
Jaringan Pemasaran

Penjualan produk-produk IKM dan UDKM hanya sekitar Jawa Tengah, ada beberapa IKM yang memasarkan produknya sampai keluar Jawa Tengah. IKM merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Berdasarkan hasil penelitian hanya 19% IKM yang melakukan promosi secara terprogram, hampir sebagian besar IKM tidak melakukan promosi. Alasan responden tidak melakukan promosi adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya melakukan promosi, kurangnya pengetahuan tentang promosi dan terbatasnya anggaran karena promosi mahal. Sedangkan bagi IKM yang melakukan promosi, media yang digunakan adalah pameran, dan radio. Isu gender yang dapat dilihat adalah perempuan tidak memiliki akses jaringan pemasaran yang baik dan tidak memiliki kemampuan teknologi yang baik.

Pembedaan peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan usaha

Pembedaan peran laki-laki dan perempuan sangat terlihat dalam IKM dan UDKM. Pembedaan peran ini dikarenakan sifat pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat, dan ketrampilan. Kondisi ini sangat berpengaruh pada pemberian gaji pada karyawan laki-laki dan perempuan.

Gambar 3
Keberadaan Perbedaan Peran Laki-laki dan Perempuan
Pada IKM dan UDKM

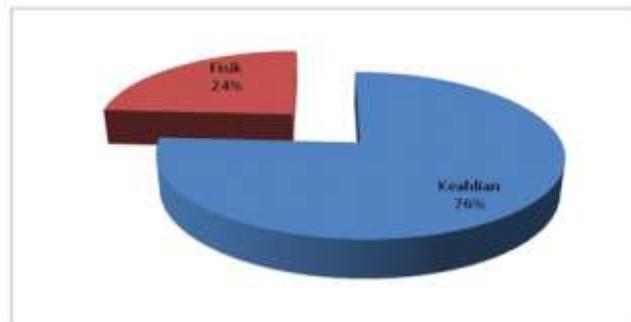


Sumber: Hasil Penelitian

Gaji laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan gaji perempuan, terutama mereka (perempuan) yang bekerja secara borongan. Perempuan mengambil kegiatan ini dengan maksud sebagai pengisi waktu senggang. Dalam dunia ketenagakerjaan disebut dengan *putting out system* (POS). Restrukturisasi ekonomi global akibat krisis ekonomi dan meningkatnya kompetisi mendorong industri untuk menggunakan "*putting-out system*" (POS) sebagai alternatif sistem produksi yang menguntungkan karena bisa mengurangi biaya produksi.

Melalui POS, sebagian besar proses produksi yang sebelumnya dilakukan dalam perusahaan dipindahkan ke rumah pekerjanya (pekerja rumahan) yang juga berarti memindahkan biaya produksi yang terkait dengan tempat produksi. Hal ini telah mendorong pertumbuhan industri berbasis POS dan Pekerja Rumahan (*home-workers atau home-based workers*). Jenis industri ini merambah dalam banyak komoditas, seperti batik (kain, kulit, kayu), tenun, konveksi, meubel (kayu dan rotan), kulit, tanah (gerabah, dll), makanan, monel, dll. Jenis industri ini telah lama ada tetapi krisis ekonomi menjadikannya semakin meningkat, penting, kompleks, dan berbeda dengan industri berbasis POS pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa POS mengalami proses transformasi yang penting dan berimplikasi pada posisi dan peran Pekerja Rumahan. Namun fenomena POS dan Pekerja Rumahan masih "disembunyikan"/"tersembunyi" dari berbagai pihak. Implikasinya belum ada kebijakan yang secara jelas mengarah pada pemberdayaan dan perlindungan mereka. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kinerja industri mikro-kecil-menengah (IMKM) berbasis POS. Ada fakta yang kontras bahwa Pekerja Rumahan memainkan peran penting untuk mendukung industri agar tetap "bertahan" dan eksis, namun mereka termarginalkan (termasuk tanpa perlindungan) dalam sistem ini. Hal ini terjadi karena IKM berbasis POS dan pengrajin terbelit dalam persoalan yang kompleks yang menyebabkan kinerja keduanya rendah, seperti tampak dalam: tidak mempunyai daya saing, produksi dan produktifitas rendah, kontinuitas usaha dan kerja rendah, berpotensi terhadap persoalan ketenagakerjaan (Pekerja Rumahan tidak tercatat sebagai tenaga kerja dan tidak dilindungi UU Ketenagakerjaan), penguasaan teknologi yang terbatas, issue gender, issue lingkungan berkaitan dengan ekolabel, penggunaan bahan kimia beresiko pada kesehatan, limbah zat warna, dan pencemaran lingkungan lainnya.

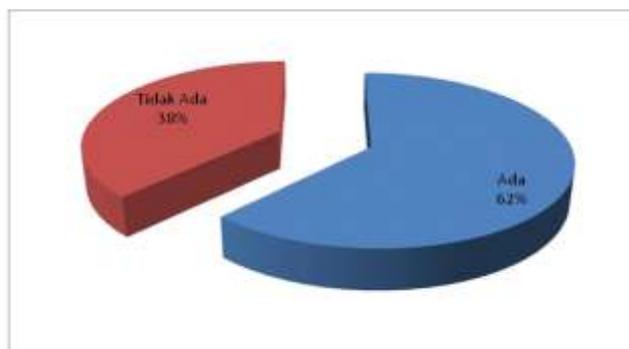
Gambar 4
Alasan Pembedaan Peran Laki-laki dan Perempuan
Pada IKM dan UDKM



Sumber: Hasil Penelitian

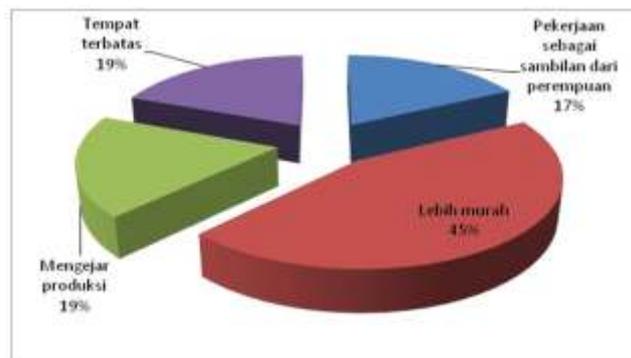
Pelaksanaan *putting out system* dikarenakan tempat usaha yang terbatas sehingga harus dibawa pulang, sebagai kerja sambilan bagi perempuan. Disisi pemilik usaha pengambilan keputusan untuk *putting out system* selain tempat kerja yang terbatas, dan upah yang diberikan lebih murah.

Gambar 5
Pelaksanaan *Putting Out System* Pada IKM dan UDKM



Sumber: Data Penelitian

Gambar 6
Alasan Pelaksanaan *Putting Out System* Pada IKM dan UDKM



Sumber: Hasil Penelitian

Isu gender yang muncul adalah munculnya pelibatan anak dalam proses produksi, dan rendahnya gaji karyawan (perempuan) pada pelaksanaan POS .

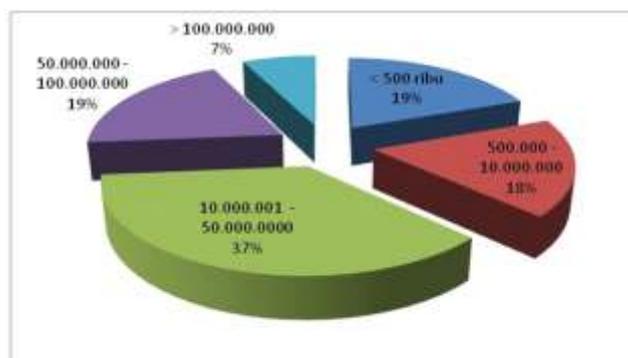
Promosi

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi pemilik usaha IKM adalah lemahnya penetrasi pasar dan kurang luasnya jangkauan wilayah pemasaran, karena itu untuk memajukan usaha kecil yang memiliki daya saing yang kuat adalah dengan membangun strategi pemasaran yang baik dan tepat sasaran. Pemasaran merupakan upaya mengatur strategi dan cara agar konsumen mau mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki sebuah perusahaan, dalam hal ini usaha kecil dan menengah. Dengan strategi pemasaran yang baik posisi usaha kecil dan menengah menjadi kuat dan patut diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi nasional yang akhirnya membawa keuntungan bagi usaha tersebut. Salah satu cara untuk mengembangkan pemasaran adalah dengan melaksanakan promosi. Promosi yang dilaksanakan oleh IKM dan UDKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah pameran yang dilaksanakan pemerintah daerah, pada IKM yang menengah telah melakukan promosi dengan menggunakan internet. IKM yang telah mampu menggunakan teknologi untuk melakukan promosi jumlahnya tidak banyak. Dalam melakukan promosi, pemilik usaha belum memanfaatkan teknologi dalam melakukan promosi. Promosi yang dilakukan masih tradisional yaitu mengikuti pameran yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil survei hampir sebagian besar tidak memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi. Isu gendernya adalah masih rendahnya kemampuan perempuan dalam menggunakan teknologi sebagai media promosi.

Kepemilikan Modal, Tempat Usaha dan Peralatan

Jumlah modal yang dimiliki pengusaha IKM dan UDKM berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 7
Modal Yang dimiliki IKM dan UDKM



Sumber: Hasil Penelitian

Permodalan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi IKM dan UDKM pada umumnya, demikian juga hasil penelitian memperlihatkan permodalan menjadi permasalahan.

Gambar 8
Permasalahan Yang Dihadapi IKM dan UDKM



Sumber: Hasil Penelitian

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan pada industri kecil dan menengah dikarenakan IKM memiliki sifat yang tertutup, yang hanya mengandalkan modal dari si pemilik dengan jumlah terbatas. Akses IKM dalam memperoleh pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya sulit, hal ini dikarenakan persyaratan secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan hasil penelitian modal yang dimiliki IKM dalam memulai usaha berasal dari modal sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, selama ini IKM mengandalkan modal dari pengepul dan pemberi bahan baku. Akses IKM dan UDKM kedalam lembaga keuangan dan perbankan masih sangat terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan masih terbatasnya perempuan dalam mengakses lembaga keuangan mikro dan perbankan, dikarenakan terbatasnya pemahaman mereka akan sumber-sumber pembiayaan.

Kepemilikan Peralatan

Peningkatan produksi IKM harus ditunjang dengan peralatan yang memadai. Berdasarkan penelitian 25% IKM mengalami permasalahan tentang terbatasnya peralatan. Peralatan yang diberikan pemerintah sudah tidak dapat digunakan karena sudah banyak yang rusak. Selain fasilitasi peralatan yang diterima IKM dan UDKM belum sesuai dengan kebutuhan produksi dan belum sesuai dengan kondisi fisik pengelola atau pekerja perempuan.

Gender Analysis Pathway (GAP)

Berdasarkan analisis gender terhadap UDKM dan IKM, ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat digunakan untuk merumuskan Gender Analysis Pathway. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- Rendahnya kapasitas SDM pemilik usaha perempuan dibandingkan laki-laki, maka perlu adanya kebijakan dilakukannya pelatihan manajemen usaha bagi pemilik UDKM dan IKM, terlebih bagi kaum perempuan, yang peranannya cukup besar dalam pengelolaan UDKM dan IKM, sehingga kapasitas SDM perempuan akan setara dengan kapasitas SDM laki-laki.
- Upah tenaga kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Untuk dapat mengurangi kesenjangan ini, perlu dilakukan rencana tindak, yaitu meningkatkan ketrampilan perempuan yang bekerja pada UDKM dan IKM, agar upah tenaga kerja perempuan setara dengan laki-laki.
- Masih kurangnya kapasitas perempuan dalam melakukan pengembangan jaringan pemasaran, sehingga perlu dilakukan pelatihan ketrampilan pengembangan jaringan pemasaran bagi

pengusaha perempuan pada IKM dan UDKM, untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pengelolaan UDKM dan IKM.

- Masih kurangnya kapasitas perempuan dalam penguasaan teknologi baik teknologi promosi maupun teknologi produksi, maka rencana aksi yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan pengembangan teknologi dalam pengembangan pemasaran bagi pemilik IKM dan UDKM, khususnya kaum perempuan, sehingga UDKM dan IKM dapat menggunakan teknologi (internet) dalam melakukan kegiatan pemasaran dan kesetaraan gender dapat tercapai.
- Masih terbatasnya pemilik usaha terutama perempuan dalam mengakses permodalan di lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya fasilitasi temu usaha dengan lembaga keuangan mikro dan perbankan, sehingga pelaku UDKM dan IKM, terutama perempuan mampu melakukan akses terhadap permodalan di lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro.

Penutup

Peranserta perempuan dalam pengelolaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) masih sangat terbatas, hal ini dapat dilihat dari :Berdasarkan hasil survey 140 responden, kepemilikan usaha sebagian besar dimiliki oleh perempuan (67,85%), namun demikian akses, partisipasi dan kontrol dalam mengikuti peningkatan kapasitas masih dipegang suami, hal ini dikarenakan suami memiliki waktu luang yang lebih banyak daripada istri. Dalam mengelola usaha isteri masih dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, sehingga dalam pelaksanaan produksi isteri kurang fokus, disamping itu suami yang mendapatkan pelatihan namun yang mengelola usaha dan melakukan proses produksi adalah istri. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan UDKM.

Dalam hal jaringan pemasaran, suami memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang lebih besar dibanding istri, hal ini dikarenakan suami memiliki waktu luang lebih besar, sehingga suami lebih memahami pasar dibanding istri. Pemberian bantuan dari pemerintah kepada UDKM terutama UDKM yang dikelola perempuan tidak memperhatikan kondisi fisik perempuan. Dalam ketenagakerjaan, *putting out system* dilakukan sebagai alternatif sistem produksi yang menguntungkan karena bisa mengurangi biaya produksi. Hal ini dilakukan karena tempat usaha yang terbatas sehingga harus dibawa pulang, sebagai kerja sambilan bagi perempuan, yang menyebabkan upah perempuan lebih kecil daripada laki-laki.

Akses perempuan terhadap lembaga keuangan masih sangat terbatas, karena terbatasnya pemahaman perempuan terhadap sumber-sumber pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013
- Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.: 15 tahun 2008 Tentang. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
- Anonim, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Anonim, Profil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Tahun 2012

Anonim, Profil Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) Jawa Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Tengah, Tahun 2012

Endang Swastuti dan Nurchayati, Peranserta Perempuan Sebagai Pelaku dan Penerima Manfaat Pembangunan di Kabupaten Semarang, Tahun 2007

Endang Swastuti dan Nurchayati, Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Atas dan Kelas Bawah Di Kota Semarang, Tahun 2007

Endang Swastuti, Analisis Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berbasis Gender di Jawa Tengah, Tahun 2012

Fakih Mansour, 2005, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar Offset, cetakan ke Sembilan

Rahayu, Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan di Bantul, Yogyakarta, Tahun 2007.